

Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Laurens Vanessa Danarta¹, Ni Komang Candra Wiguna Dewi², Veronika Erlita Januarti Gunawan³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Universitas Matana, Tangerang, Indonesia

Email: ¹laurens.danarta@student.matanauniversity.ac.id,

²nikomang.wiguna@student.matanauniversity.ac.id,

³veronika.gunawan@student.matanauniversity.ac.id

Abstract

This study aims to examine the influence of independent commissioners, audit committees, and executive character on tax avoidance practices in companies. The focus of this study is on manufacturing companies operating in the beverage and food sub-sector and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2023. The data used in this study were obtained from the companies' financial statements and annual reports. The sample was determined using a purposive sampling method based on certain criteria, resulting in 105 observational data. The research approach used was quantitative, with analytical methods including descriptive statistics, classical assumption testing, and hypothesis testing. All data processing was carried out using SPSS version 25 software. The results showed that of the three independent variables studied, only executive character had a positive and significant effect on tax avoidance. Conversely, independent commissioners and audit committees did not show a significant effect on tax avoidance practices in the companies studied. This finding implies that executive character plays a significant role in determining the level of corporate tax compliance compared to corporate governance mechanisms.

Keywords: Independent Commissioners, Audit Committees, Tax Avoidance, Executive Character.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Fokus penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sub-sektor minuman dan makanan serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 105 data observasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan metode analisis yang meliputi statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan uji hipotesis. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga variabel independen yang diteliti, hanya karakter eksekutif yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, komisaris independen dan komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Temuan ini memberikan implikasi bahwa karakter pribadi eksekutif memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak perusahaan dibandingkan dengan mekanisme tata kelola perusahaan.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Penghindaran Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen vital dalam pembangunan nasional, karena pajak menjadi sumber penerimaan utama negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pembayaran ini bersifat memaksa sesuai ketentuan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan utama untuk pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menjadi penyumbang terbesar. Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target yang telah ditetapkan. Dari jumlah tersebut, pajak menyumbang Rp1.932,4 triliun atau setara 100,5% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya [1].

Perbedaan antara kepentingan pemerintah dan pelaku usaha dalam konteks pajak sering kali menimbulkan potensi penghindaran pajak. Pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan, sedangkan pelaku usaha cenderung berupaya untuk meminimalkan beban pajak demi efisiensi keuangan. Perbedaan tujuan ini melahirkan fenomena penghindaran pajak yang dilakukan melalui manajemen pajak agresif, namun tetap sah secara hukum untuk mengurangi beban pajak [2].

Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. pada tahun 2009. Perusahaan tersebut melakukan restrukturisasi bisnis melalui pendirian entitas anak dan pengalihan operasional ke PT Indofood CBP Sukses Makmur. Kasus ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung dengan putusan yang mengharuskan Indofood membayar kembali pajak penghasilan sebesar Rp1,47 miliar kepada Direktorat Jenderal Pajak [3]. Kasus ini menjadi contoh bagaimana suatu perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum untuk menekan beban pajak tanpa melanggar aturan, tetapi tetap menimbulkan risiko terhadap reputasi dan kepercayaan publik.

Faktor internal perusahaan juga turut memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak. Salah satu faktor tersebut adalah struktur tata kelola perusahaan. Dalam struktur ini, keberadaan komisaris independen menjadi penting karena mereka memiliki peran pengawasan terhadap manajemen dan dapat mereduksi peluang terjadinya penyimpangan. Berdasarkan teori keagenan, komisaris independen bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja manajemen agar sejalan dengan kepentingan pemegang saham [4]. Namun, berbagai hasil penelitian terkait hubungan antara komisaris independen dan penghindaran pajak menunjukkan temuan yang berbeda-beda. [5] Sebagian studi menemukan bahwa keberadaan komisaris independen justru berkontribusi terhadap peningkatan praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, [6] ada juga temuan yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik tersebut.

Komite audit juga menjadi salah satu mekanisme penting dalam pengawasan internal perusahaan yang diduga berperan dalam menekan tingkat penghindaran pajak. Komite ini biasanya beranggotakan individu independen yang membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan [7]. Menurut teori keagenan, Semakin efektif pelaksanaan tugas komite audit, maka semakin rendah kemungkinan manajemen melakukan pelanggaran termasuk penghindaran pajak [8]. Penelitian [9] menyatakan bahwa keberadaan komite audit mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan [10] penelitian lain menyebutkan bahwa komite audit tidak memiliki dampak yang signifikan.

Di samping bagian tata kelola *corporate*, karakter eksekutif pun menjadi variabel penting yang memengaruhi keputusan manajerial, termasuk dalam aspek perpajakan. Karakter eksekutif menggambarkan kecenderungan perilaku manajerial dalam mengambil keputusan strategis, yang dapat dilihat dari seberapa agresif atau konservatif seorang eksekutif dalam menghadapi risiko perusahaan. Dalam konteks teori keagenan, eksekutif dengan karakter *risk taker* cenderung memiliki toleransi risiko yang tinggi dan lebih berani dalam memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan biaya pajak, termasuk dari praktek penghindaran pajak. Sebaliknya, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* cenderung menghindari risiko dan lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan. Hasil penelitian [11] menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh [12] yang menemukan bahwa karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan studi-studi terdahulu, terlihat bahwa masih terdapat perbedaan hasil temuan yang menunjukkan adanya gap penelitian, baik dari sisi periode, maupun sektor industri yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan membatasi ruang lingkup pada perusahaan manufaktur sub sektor minuman dan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari masa 2021 sampai 2023. Pemilihan pada sektor ini didasarkan pada partisipasi yang besar akan perekonomian tanah air serta keterbukaannya terhadap pengawasan dan regulasi. Periode yang dipilih juga mencerminkan masa pemulihan pascapandemi COVID-19, yang mampu menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait strategi pengelolaan pajak oleh perusahaan [13].

Studi ini merupakan perluasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh [10] yang meneliti hubungan tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi. Perbedaan utama terletak pada objek, periode, dan variabel yang dipakai. Studi disini menambahkan variabel karakter eksekutif dan memperbarui periode analisis, serta menggunakan pendekatan yang lebih spesifik terhadap subsektor industri makanan dan minuman. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris yang lebih relevan dalam mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.

Tujuan dari studi yang dilakukan ini ialah untuk melakukan pengujian terhadap pengaruh komisaris independen, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di subsektor minuman dan makanan yang tercatat di BEI pada 2021–2023.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor minuman dan makanan?
2. Apakah karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor minuman dan makanan?
3. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor minuman dan makanan?

1.2 Hipotesis

1.2.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan hal penting di struktur tata kelola *corporate*, berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Komisaris independen tidak memiliki hubungan kepemilikan saham maupun keterikatan bisnis dengan perusahaan tempatnya bertugas. Berdasarkan teori keagenan, kehadiran komisaris independen diharapkan mampu mencegah perilaku manajemen yang merugikan pemilik saham serta menjaga keselarasan kepentingan antara keduanya. Fungsi pengawasan ini menjadi krusial dalam mengendalikan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh [5] serta [4], menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen justru memiliki hubungan positif terkait praktik penghindaran pajak. Berarti, makin tinggi proporsi komisaris independen, makin besar pula probabilitas perusahaan terlibat dalam upaya menghindari kewajiban pajak. Hal ini diduga disebabkan oleh tantangan koordinasi yang muncul di antara para komisaris independen, yang berpotensi menurunkan efektivitas fungsi pengawasan dalam pengambilan keputusan.

Namun, hasil penelitian lain mengindikasikan bahwa komisaris independen belum memberikan dampak signifikan terhadap penghindaran pajak [6]. Dalam praktiknya, penambahan jumlah komisaris independen kerap kali hanya bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi, tanpa diiringi peningkatan fungsi pengawasan yang nyata. Dalam studi disini, penghindaran pajak dihitung dengan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), di mana nilai ETR yang kecil mencerminkan level penghindaran pajak yang tinggi dan sebaliknya. Dari uraian tersebut, hipotesis pertama yang disampaikan adalah:

H1: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

1.2.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan bagian penting dalam struktur pengawasan perusahaan yang bertugas memastikan proses audit eksternal berjalan dengan baik serta menjembatani komunikasi antara auditor eksternal dan pihak internal perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, keberadaan komite audit yang memadai akan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen,

sehingga dapat menekan potensi pelanggaran dalam pelaporan keuangan. Untuk itu, idealnya komite audit terdiri dari individu yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi, agar mampu menjalankan perannya secara efektif dan profesional.

Hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian [14] - [4] menunjukkan bahwa komite audit dapat memengaruhi penghindaran pajak secara positif dan signifikan. Artinya, keberadaan komite audit belum tentu berhasil menurunkan praktik penghindaran pajak, karena fungsinya lebih sering bersifat formalitas dan kurang memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan perpajakan yang strategis. Besarnya jumlah anggota komite audit juga tidak serta-merta mencerminkan kekuatan pengawasan yang lebih baik, sehingga efektivitas pengaruhnya terhadap penghindaran pajak masih dipertanyakan dalam berbagai kasus.

Namun demikian, penelitian lain menemukan jika komite audit tidak punya dampak besar terkait tindakan penghindaran pajak [10]. Ini menandakan bahwa baik jumlah kecil maupun besar anggota komite audit tidak menjamin efektivitas dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. Pada studi disini, penghindaran pajak di proksikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR), dimana semakin rendah ETR, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak dan sebaliknya. Dari uraian tersebut, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

1.2.3 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Karakter eksekutif menggambarkan kecenderungan perilaku manajerial dalam mengambil keputusan strategis, yang dapat dilihat dari seberapa agresif atau konservatif seorang eksekutif dalam menghadapi risiko perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, kendali terhadap kebijakan perusahaan tetap berada pada eksekutif meskipun terdapat pendelegasian tugas. Oleh sebab itu, sifat pribadi seorang eksekutif akan berpengaruh terhadap keputusan strategis, termasuk praktik penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya, seperti penelitian [15] dan [16] menunjukkan bahwa karakter *risk taker* dari eksekutif berkorelasi dengan rendahnya *Effective Tax Rate* (ETR), yang mencerminkan tingginya kecenderungan untuk menghindari pajak. Semakin tinggi risiko perusahaan, maka eksekutif cenderung lebih berani mengambil langkah efisiensi pajak meskipun berada pada area abu-abu hukum.

Namun, terdapat juga penelitian yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak selalu berdampak pada keputusan penghindaran pajak [17]. Dalam hal ini, faktor lain seperti kebijakan internal, kondisi ekonomi, atau tekanan dari pemegang saham dapat menjadi penentu utama. Studi disini memakai ETR untuk indikator penghindaran pajak, di mana nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi terkait penghindaran pajak dan sebaliknya. Dari hal tersebut, hipotesis ketiga yang disampaikan ialah:

H3: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan maksud untuk melakukan pengujian terhadap pengaruh komite audit, komisaris independen, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Untuk data yang dipakai merupakan data sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor minuman dan makanan yang ada di BEI untuk masa 2021 hingga 2023. Data didapatkan dari *website* resmi BEI (www.idx.co.id) atau melalui *website official* masing-masing perusahaan.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Definisi
1	Penghindaran Pajak [8]	$ETR = \frac{Income\ Tax\ Expense}{Profit\ before\ Tax}$	Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk strategi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya secara sah. Strategi ini dilakukan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi memanfaatkan celah atau kekurangan dalam sistem perpajakan guna meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar [18].

2	Komisaris Independen [19]	$PKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$	Komisaris independen berperan penting dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris ini tidak memiliki keterkaitan kepentingan dengan perusahaan, baik dalam bentuk hubungan kepemilikan saham maupun hubungan bisnis, sehingga diharapkan mampu bertindak secara objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan [20].
3	Komite Audit [21]	$KA = \text{Jumlah Komite}$	Komite audit ialah sebuah unit yang di bentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan membantu menjalankan fungsi pengawasan terkait proses pelaporan keuangan dan kepatuhan perusahaan. Anggota komite audit bersifat independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan [4].
4	Karakter Eksekutif [16]	$CR = \frac{EBITDA}{\text{Total Asset}}$	Karakter eksekutif mencerminkan pola perilaku manajerial yang tercermin dari sikap pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan strategis, khususnya ketika menghadapi ketidakpastian. Individu dengan karakter eksekutif berani cenderung mengambil keputusan berisiko, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan keuangan dan operasional perusahaan [12].

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada studi disini adalah seluruh *corporate* manufaktur sub sektor minuman dan makanan yang tercatat pada BEI pada tahun 2021 sampai 2023. Metode pemilihan sampel diterapkan melalui metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan *sampling* berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Perusahaan yang di jadikan *sampling* di studi disini adalah perusahaan yang memenuhi sejumlah kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria Penelitian	Emiten	3 Tahun
1	Perusahaan manufaktur sub sektor minuman dan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 sampai 2023	71	213
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan dengan lengkap selama tahun 2021 sampai 2023	(8)	(24)
3	Perusahaan manufaktur sub sektor minuman dan makanan yang mengalami kerugian selama tahun 2021 sampai 2023	(20)	(60)
4	Laporan keuangan disajikan tidak dalam mata uang Rupiah (Indonesia)	(3)	(9)
5	Perusahaan yang tidak memiliki data dan informasi lengkap terkait variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini.	(4)	(12)
Jumlah Sampel		35	105

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, penulis menetapkan sebanyak 35 perusahaan yang berasal dari sub sektor minuman dan makanan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Perusahaan Purposive Sampling

No	Nama Perusahaan	Kode
1	Astra Agro Lestari Tbk.	AALI
2	Akasha Wira International Tbk.	ADES
3	Bisi International Tbk.	BISI
4	Formosa Ingredient Factory Tbk.	BOBA
5	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA
6	Sariguna Primatirta Tbk	CLEO
7	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN
8	Central Proteina Prima Tbk	CPRO
9	Cisadane Sawit Raya Tbk.	CSRA
10	Delta Jakarta Tbk	DLTA
11	Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.	DSFI
12	Dharma Satya Nusantara Tbk.	DSNG
13	FAP Agri Tbk	FAPA
14	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	GOOD
15	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
16	Indofood Sukses Makmur Tbk	IKAN
17	Era Mandiri Cemerlang Tbk	IKAN
18	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	JPFA
19	Mulia Boga Raya Tbk	KEJU
20	Malindo Feedmill Tbk	MAIN
21	PP London Sumatra Indonesia Tbk	LSIP
22	Mayora Indah Tbk	MYOR
23	Indo Oil Perkasa Tbk	OILS
24	Palma Serasih Tbk.	PSGO
25	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI
26	Sampoerna Agro Tbk	SGRO
27	Salim Ivomas Pratama Tbk	SIMP
28	Sekar Bumi Tbk	SKBM
29	Sekar Laut Tbk	SKLT
30	SMART Tbk	SMAR
31	Siantar Top Tbk	STTP
32	Triputra Agro Persada Tbk	TAPG
33	Tunas Baru Lampung Tbk	TBLA
34	Tigaraksa Satria Tbk	TGKA
35	Bakrie Sumatera Plantations Tbk	UNSP

Sumber: www.idx.co.id diolah peneliti (2025)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan ringkasan data dalam bentuk yang sederhana dan informatif untuk mempermudah pemahaman. Analisis ini mencakup ukuran nilai maksimum, minimum, standar deviasi, dan rata-rata (*mean*). Dalam penelitian ini, analisa statistik deskriptif dilaksanakan memakai perangkat lunak SPSS versi 25, dan hasilnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen (X1)	105	0,33333	0,66667	0,4025609	0,08326802
Komite Audit (X2)	105	3	5	3,06	0,335
Karakter Eksekutif (X3)	105	0,03773	0,46501	0,1495535	0,06179402
Penghindaran Pajak (Y)	105	0,01744	0,80690	0,2384641	0,10387571
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25 (2025)

Variabel komisaris independen (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,33333 atau dibulatkan menjadi 0,33. Nilai ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan, antara lain Bisi International Tbk, Akasha Wira International Tbk, Formosa Ingredient Factory Tbk, Sariguna Primatirta Tbk, Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, Charoen Pokphand Indonesia Tbk, Central Proteina Prima Tbk, Cisadane Sawit Raya Tbk, Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, Dharma Satya Nusantara Tbk, Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Mulia Boga Raya Tbk, Nippon Indosari Corpindo Tbk, Palma Serasih Tbk, Salim Ivomas Pratama Tbk, dan Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Adapun nilai maksimum dari variabel ini tercatat sebesar 0,66667 atau 0,67, yang ditemukan pada perusahaan Sampoerna Agro Tbk. Nilai rata-rata untuk proporsi komisaris independen dalam sampel penelitian ini adalah sebesar 0,4025609, dengan standar deviasi sebesar 0,08326802. Data ini mencerminkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki proporsi komisaris independen sekitar 40%, dengan tingkat penyebaran yang cukup rendah dan cenderung seragam. Artinya, terdapat kemiripan antar perusahaan dalam hal komposisi komisaris independen.

Variabel komite audit (X2) mempunyai nilai minimum sebanyak tiga anggota, yang merupakan jumlah komite audit pada seluruh perusahaan sampel dalam penelitian ini, kecuali Malindo Feedmill Tbk yang tercatat memiliki jumlah komite audit tertinggi, yaitu sebanyak 5 anggota. *Mean* dari variabel ini memiliki nilai 3,06 dengan nilai standar deviasi 0,335. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan telah memenuhi ketentuan minimum jumlah anggota komite audit, yaitu 3 orang, dan hanya sebagian kecil perusahaan yang mempunyai jumlah anggota komite audit melebihi angka tersebut.

Variabel karakter eksekutif (X3) yang diproksikan dengan risiko perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,03773 atau dibulatkan menjadi 0,04, yang tercatat pada perusahaan Sekar Bumi Tbk. Sementara itu, nilai maksimum dari variabel ini adalah sebesar 0,46501 atau 0,47, yang dimiliki oleh Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Rata-rata nilai karakter eksekutif pada seluruh sampel ialah sebesar 0,1495535, dengan nilai standar deviasi 0,06179402. Data ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat risiko perusahaan dalam sampel penelitian tergolong rendah, dengan penyebaran data yang relatif seragam di antara perusahaan yang diteliti.

Variabel penghindaran pajak (TA) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01744 atau dibulatkan menjadi 0,02, yang tercatat pada perusahaan Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Adapun nilai maksimum dari variabel ini adalah sebesar 0,80690 atau 0,81, yang dimiliki oleh Sekar Bumi Tbk. Rata-rata nilai penghindaran pajak pada seluruh sampel perusahaan ialah sebesar 0,2384641, dengan nilai standar deviasi 0,10387571. Temuan menunjukkan kalau secara umum tingkat penghindaran pajak perusahaan-perusahaan dalam sampel berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan distribusi data yang relatif homogen.

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki sebaran data yang mengikuti distribusi normal. Distribusi normal merupakan syarat penting dalam memastikan validitas hasil analisis regresi. Data yang memenuhi distribusi normal dianggap sebagai data yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun hasil pengujian normalitas dalam studi disini disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data

Unstandardized Residual	
<i>Monte Carlo Sig (2-tailed)</i>	0,063

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25 (2025)

Tabel di atas menyajikan hasil mengenai uji normalitas data yang dilakukan memakai metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji memperlihatkan nilai *Monte Carlo Sig (2-tailed)* 0,063. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, analisis dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan mengevaluasi apakah ada atau tidak nya hubungan antar variabel independen di model regresi. Model regresi dinyatakan baik apabila pada variabel independen tidak menunjukkan adanya korelasi. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Komisaris Independen (X1)	0,808	1,237	Tidak terjadi multikolonieritas
Komite Audit (X2)	0,841	1,189	Tidak terjadi multikolonieritas
Karakter Eksekutif (X3)	0,927	1,079	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25 (2025)

Merujuk pada tabel diatas, seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni komisaris independen, komite audit, dan karakter eksekutif memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, seluruh variabel tersebut dapat dinyatakan layak untuk tahap selanjutnya.

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser dimanfaatkan untuk mengetahui keberadaan gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat ketidakkonsistenan varians residual antar pengamatan. Hasil pengujian heteroskedastisitas pada studi disini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Komisaris Independen (X1)	0,307	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komite Audit (X2)	0,238	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Karakter Eksekutif (X3)	0,096	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25 (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen di studi ini, komite audit, komisaris independen, serta karakter eksekutif, memiliki nilai signifikansi (Sig.) yang melebihi angka 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dapat dianggap memenuhi syarat kelayakan karena terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan mengetahui mungkinkah ada hubungan antara kesalahan (*error*) di periode sekarang yang disebabkan oleh kesalahan pada periode sebelumnya. Apabila ditemukan hubungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi, maka model tersebut dinilai layak dan sesuai. Adapun hasil pengujian autokorelasi dalam studi disini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,394	0,155	0,130	0,08910	1,773

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25 (2025)

Tabel yang ada di atas menunjukkan kalau nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,773 pada tingkat signifikansi 5%. Jumlah observasi dalam studi disini, yang dilambangkan dengan *n*, ialah 105, sementara jumlah variabel independen (*k*) sebanyak 4. Berdasarkan nilai tersebut, diketahui bahwa batas bawah (*dL*) ialah 1,6038 dan batas atas (*dU*) ialah 1,7617. Suatu model dinyatakan tidak mengalami autokorelasi apabila nilai DW berada di antara *dU* dan $(4 - dU)$, ataupun dengan kata lainnya memenuhi kriteria $dU < DW < (4 - dU)$. Dalam hal ini, nilai $4 - dU$ adalah sebesar 2,2383 ($4 - 1,7617$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai DW berada dalam rentang tersebut, yaitu $1,7617 < 1,773 < 2,2383$. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi, kemudian analisis dapat diteruskan ke tahap berikutnya.

3.3 Hasil Uji Hipotesis

3.3.1 Uji Koefisien Korelasi (R)

Pengujian koefisien korelasi (R) dimaksudkan untuk menilai sejauh mana hubungan yang terjadi linear antara dua variabel. Pada analisis korelasi ini, tidak dilakukan pembedaan antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun hasil dari uji koefisien korelasi di studi ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)

Model	R
1	0,394

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25 (2025)

Tabel yang ada di atas menunjukkan kalau nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,394 atau setara dengan 39,4%. Nilai ini secara statistik mengindikasikan adanya hubungan linear yang bersifat positif antara variabel independen yang mencakup komisaris independen, komite audit, dan karakter eksekutif dengan variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Hubungan tersebut bersifat searah, namun berada pada kategori kekuatan korelasi yang lemah.

3.3.2 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Uji koefisien determinasi (*adjusted R-square*) dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dalam model regresi. Nilai *adjusted R-square* berada dalam kisaran antara nol hingga satu. Adapun hasil pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,130

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25 (2025)

Tabel 4.8 menunjukkan kalau nilai *adjusted R square* yaitu 0,130. Nilai ini mengindikasikan kalau sebanyak 13% variasi dalam variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, bisa diuraikan oleh variabel-variabel independen yang dipakai di studi ini, yaitu komite audit, komisaris independen, dan karakter eksekutif. Sementara itu, sisa nya sebanyak 87% terpengaruh dari faktor-faktor lain di luar variabel yang sudah dimasukkan di model regresi ini.

3.3.3 Uji F

Uji F dipakai dengan tujuan mengevaluasi mungkinkah semua variabel independen yang digunakan di studi ini secara simultan mempunyai pengaruh yang banyak terkait variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji F

F	Sig.
6,195	0,001

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25 (2025)

Tabel yang ada di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebanyak 0,001. Karena nilai ini lebih rendah dari batas signifikansi 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan kalau komite audit, komisaris independen, dan karakter eksekutif secara bersamaan memengaruhi penghindaran pajak. Artinya model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik dan dinyatakan layak atau sesuai untuk digunakan dalam analisis.

3.3.4 Uji t

Uji t digunakan untuk mengidentifikasi apakah masing-masing variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada taraf signifikansi 0,05. Adapun hasil pengujian uji t ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,682	0,145		4,716	0,000
Komisaris Independen (X1)	-0,008	0,154	-0,005	-0,054	0,957
Komite Audit (X2)	-0,020	0,257	-0,008	-0,080	0,937
Karakter Eksekutif (X3)	-0,495	0,119	-0,397	-4,178	0,000

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 25 (2025)

Dari hasil uji *t*, model persamaan regresi di studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TA = 0,679 + 0,005 IOWn - 0,008 IC - 0,022 AC - 0,491 CR + e$$

Tabel hasil uji t memperlihatkan kalau variabel komisaris independen (X1) mempunyai nilai signifikansi sebanyak 0,957, yang juga melebihi angka 0,05, dengan koefisien regresi sebanyak -0,008. Berdasarkan hasil itu, hipotesis pertama (H1) dinyatakan tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh yang besar terkait penghindaran pajak. Kemungkinan penyebabnya adalah karena tugas komisaris independen dalam perusahaan lebih bersifat simbolis atau hanya sebagai formalitas, serta adanya keterbatasan akses terhadap informasi teknis yang berkaitan dengan aspek perpajakan.

Selanjutnya variabel komite audit (X2), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,937 dan koefisien regresi sebesar -0,020. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka hipotesis kedua (H2) juga ditolak. Meskipun komite audit berperan dalam proses pelaporan keuangan, fokus utama dari fungsi ini bukan pada kebijakan perpajakan, sehingga kontribusinya terhadap penghindaran pajak tidak terbukti secara statistik.

Sementara itu, variabel karakter eksekutif (X3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien regresi sebesar -0,495. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima, yang memperlihatkan kalau karakter eksekutif memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) dan secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini memperlihatkan kalau karakteristik eksekutif bersifat *risk taker* atau pengambil risiko, sehingga cenderung berani melakukan tindakan-tindakan yang mengandung risiko, termasuk strategi penghindaran pajak.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak tidak terbukti secara signifikan. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,957, lebih besar dari ambang batas 0,05, dengan koefisien regresi sebesar -0,008. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan manufaktur sub sektor minuman dan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2023 tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Keterbatasan peran dalam pengawasan, minimnya kewenangan, dan akses terhadap informasi menjadi faktor utama yang menyebabkan efektivitas komisaris independen dalam mengendalikan strategi perpajakan perusahaan tidak optimal. Dalam praktiknya, keberadaan komisaris independen sering hanya bersifat formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Selain itu, penghindaran pajak merupakan tindakan yang kompleks dan bersifat teknis, sehingga sulit untuk diawasi tanpa keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian [6], [14], [19], serta [21] yang menyatakan bahwa jumlah maupun keberadaan komisaris independen tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan penghindaran pajak. Sebagai pihak eksternal, komisaris independen tidak memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan manajemen. Meskipun secara teoritis peran komisaris independen sesuai dengan mekanisme pengawasan dalam teori keagenan, dalam praktiknya efektivitasnya rendah karena sifatnya yang lebih simbolik dan terbatasnya akses terhadap informasi penting perusahaan. Hasil ini juga bertentangan dengan penelitian [4] serta [5], yang menemukan adanya hubungan positif antara proporsi komisaris independen dengan tingkat penghindaran pajak.

3.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, komite audit tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,937, lebih besar dari ambang batas 0,05, dengan koefisien regresi sebesar -0,020. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dinyatakan tidak diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit pada perusahaan manufaktur sub sektor minuman dan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan karena fungsi utama komite audit lebih terfokus pada pengawasan pelaporan keuangan daripada kebijakan strategis seperti pajak. Meski berperan mendampingi dewan komisaris, keputusan mengenai pajak tetap menjadi wewenang manajemen perusahaan.

Selain itu, jumlah anggota komite audit belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan karena dipengaruhi oleh kompetensi masing-masing anggota. Temuan ini sejalan dengan penelitian [10], [22], serta [5], yang menyatakan bahwa jumlah maupun proporsi komite audit tidak memiliki dampak terhadap keputusan perusahaan dalam menjalankan strategi penghindaran pajak. Komite audit hanya berperan dalam memastikan akurasi pelaporan keuangan sesuai

standar akuntansi, tanpa kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan operasional. Hal ini juga didukung oleh [8], yang menyebutkan bahwa ada pihak lain dalam perusahaan yang lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun teori keagenan menyatakan bahwa keberadaan komite audit dapat membatasi perilaku oportunistik manajer, dalam praktiknya, komite audit belum menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh terhadap kebijakan perpajakan. Temuan ini berbeda dengan penelitian [4] serta [14], yang menemukan hubungan positif antara jumlah anggota komite audit dan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

3.4.3 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis, karakter eksekutif yang diprosikan dengan risiko perusahaan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebesar -4,178 menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR dan positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif di perusahaan manufaktur sub sektor minuman dan makanan yang memiliki kecenderungan sebagai pengambil risiko (*risk taker*) mendorong tindakan yang lebih berani, termasuk dalam hal efisiensi beban pajak. Ketika perusahaan menghadapi risiko tinggi, terutama dalam hal operasional dan keuangan, manajemen cenderung memilih strategi agresif seperti penghindaran pajak guna menjaga kestabilan arus kas.

Hasil ini mendukung teori keagenan, yang menyatakan bahwa manajer sebagai agen bertindak berdasarkan kepentingan dan risiko yang di hadapi, terkadang tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Dalam situasi penuh ketidakpastian, manajer dapat memilih strategi pajak agresif untuk mempertahankan laba dan memenuhi harapan pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme pengawasan yang kuat berpotensi memperbesar peluang penghindaran pajak. Penelitian ini konsisten dengan temuan [11], [15], [16], dan [23], yang menyatakan bahwa peningkatan risiko mendorong kecenderungan eksekutif melakukan penghindaran pajak yang menjelaskan bahwa eksekutif bersifat *risk taker*. Namun, hasil ini bertentangan dengan studi [12] - [24] yang menyimpulkan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 35 perusahaan manufaktur sub sektor minuman dan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan unsur tata kelola perusahaan tersebut belum mampu memberikan tekanan yang efektif terhadap manajemen untuk menghindari praktik penghindaran pajak.
2. Karakter eksekutif yang diprosikan dengan risiko perusahaan terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *effective tax rate*, dan positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan stabilitas keuangan.
3. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama komite audit lebih terfokus pada pengawasan pelaporan keuangan daripada kebijakan strategis seperti pajak. Meski berperan mendampingi dewan komisaris, keputusan mengenai pajak tetap menjadi wewenang manajemen perusahaan.

Implikasi dari hasil ini menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal, khususnya melalui peningkatan kapasitas komisaris independen dalam hal tata kelola dan kepatuhan fiskal, serta perluasan peran komite audit untuk turut mengevaluasi strategi perpajakan yang diterapkan perusahaan. Manajemen risiko juga perlu diintegrasikan secara menyeluruh dengan kepatuhan perpajakan untuk mencegah dampak jangka panjang yang merugikan, baik secara hukum maupun reputasi.

Untuk memperkaya temuan di masa mendatang, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan yang dapat memberikan penjelasan lebih komprehensif terhadap penghindaran pajak. Pendekatan kualitatif, seperti wawancara dengan manajemen keuangan, dapat menjadi pelengkap pendekatan

kuantitatif agar pemahaman terhadap praktik perpajakan menjadi lebih mendalam. Cakupan sektor industri juga sebaiknya diperluas, serta periode observasi ditingkatkan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan konsisten. Selain itu, penggunaan pengukuran alternatif seperti *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) atau *Book Tax Difference* (BTD) dapat menjadi pilihan dalam menilai tingkat penghindaran pajak perusahaan.

REFERENCES

- [1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif," kemenkeu.go.id. Accessed: Feb. 04, 2025. [Online]. Available: <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- [2] Rahmadani, I. Muda, and E. Abubakar, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 8, no. 2, pp. 375–392, 2020, doi: 10.17509/jrak.v8i2.22807.
- [3] N. W. Astuti and Bandi, "Modal Organisasi, Nilai Perusahaan, dan Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 23, no. 2, pp. 220–233, Aug. 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v23i2.1121>.
- [4] N. P. B. I. Cahyani and N. Noviani, "Manajemen Laba, Sales Growth, Good Corporate Governance dan Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 33, no. 11, pp. 2981–2995, Nov. 2023, doi: 10.24843/eja.2023.v33.i11.p12.
- [5] D. Pratomo and R. A. Rana, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 91–103, Jan. 2021, doi: 10.30656/jak.v8i1.2487.
- [6] W. S. Palupi, N. Hidayah, and T. Septyanto, "Analysis Of The Effect Of Good Corporate Governance, Company Profitability And Risk On Tax Avoidance," *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, vol. 19, no. 2, pp. 130–143, Dec. 2020, doi: 10.32639/fokusbisnis.v19i2.721.
- [7] Ikatan Komite Audit Indonesia, "Tentang Komite Audit," IKAI 2004 - 2025. Accessed: Feb. 04, 2025. [Online]. Available: <https://ikai.id/tentang-komite-audit/>
- [8] A. Sulistyawati and A. I. E. Rahmawati, "Determinants of Tax Avoidance: Gender Diversity, Capital Intensity, Audit Committee, and Board Size," *ULTIMA Accounting*, vol. 16, no. 1, pp. 152–170, Jun. 2024, doi: <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v16i1.3571>.
- [9] M. Solihah, T. Murdijaningsih, and K. S. Danuta, "Tax Avoidance of Mining Companies From the Return on Assets, Institutional Ownership, and Audit Committee Perspectives," *Journal of Business Management Review*, vol. 1, no. 2, pp. 076–089, 2020, doi: 10.47153/jbmr12.172020.
- [10] C. N. Kadjiman and J. Tangkau, "Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019)," *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, vol. 3, no. 3, pp. 517–526, Dec. 2022, doi: <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3206>.
- [11] R. E. Prasatya, J. Mulyadi, and Suyanto, "Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi," *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, vol. 7, no. 2, pp. 153–162, Dec. 2020, doi: <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.02.13>.
- [12] H. R. Ummaht and R. Indrawan, "Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, vol. 6, no. 1, pp. 446–462, 2022, doi: <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1883>.
- [13] P. S. Adiwiratna and F. I. Lawita, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan Periode 2018-2020," *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Universitas Kalbis*, vol. 10, no. 1, pp. 68–83, Mar. 2024, doi: <https://doi.org/10.53008/kalbisiana.v10i1.3525>.
- [14] M. F. Hilmi, S. N. Amalia, Z. Amry, and S. Setiawati, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 4, pp. 3533–3540, Oct. 2022, doi: 10.33395/owner.v6i4.1178.

- [15] P. C. Lukito and R. M. Oktaviani, "Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 202–211, Jan. 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.532.
- [16] K. L. Asih and D. Darmawati, "The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance," *Asia Pacific Fraud Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 235–248, Dec. 2022, doi: 10.21532/apfjournal.v6i2.222.
- [17] M. K. Ratu and V. Meiriasari, "Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance," *JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI*, vol. 12, no. 2, pp. 127–130, Dec. 2021, doi: <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v12i2.1525>.
- [18] S. Setyawan, "Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG): Pengaruh Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 4, no. 2, pp. 152–161, Nov. 2021, doi: 10.22219/jaa.v4i2.17992.
- [19] A. Tahar and D. Rachmawati, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)," *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. XVIII, no. 1, pp. 98–115, Mar. 2020, doi: <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>.
- [20] B. Yohana, D. Darmastuti, and S. Widyastuti, "Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, vol. 6, no. 1, pp. 112–129, May 2022, doi: 10.18196/rabin.v6i1.13468.
- [21] W. S. Murtina, W. E. Putra, and R. Yustien, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)," *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol. 17, no. 2, pp. 47–66, 2020, doi: <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66>.
- [22] P. N. H. Ardianti, "Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 26, no. 3, pp. 2020–2040, Mar. 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v26.i03.p13.
- [23] I. P. Sari and Purwatiningsih, "Pengaruh Sales Growth, Karakter Eksekutif dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Subsektor Food & Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)," *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, vol. 7, no. 4, pp. 1106–1119, Oct. 2024, doi: <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i4.958>.
- [24] A. T. Madina and I. Hapsari, "Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance," *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 3, no. 4, pp. 259–265, Oct. 2024, doi: 10.54259/akua.v3i4.3273.